

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

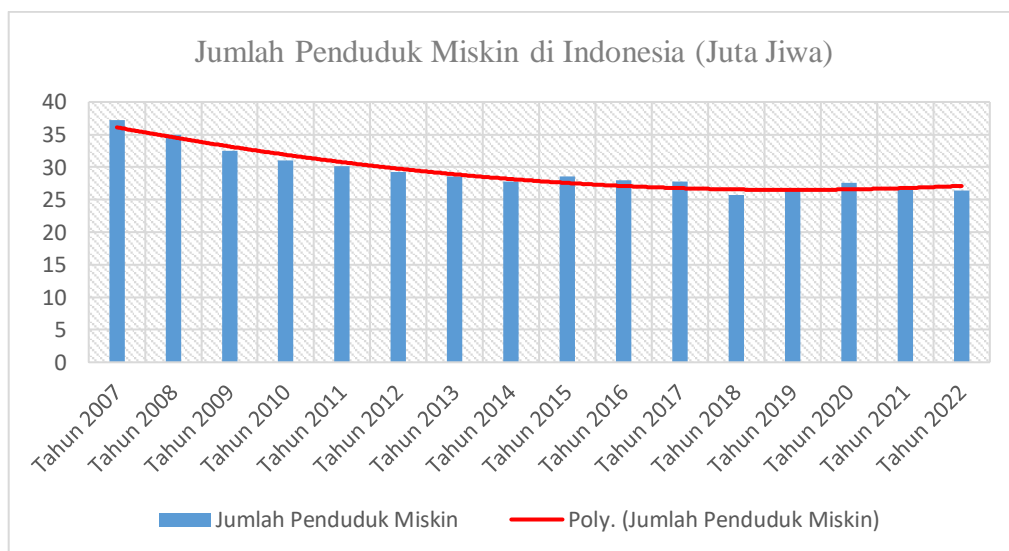
### **1.1 Latar Belakang**

Saat ini Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di dunia, yaitu sebanyak 275,77 juta jiwa. Hal tersebut disebabkan oleh angka kelahiran yang terus meningkat, yang berdampak pada tingginya tingkat kemiskinan sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional (Mutia, 2022). Dalam mengatasi permasalahan kemiskinan, sangat diperlukan adanya campur tangan dari pemerintah sebagai pembuat kebijakan.

Kemiskinan merupakan suatu permasalahan sosial yang masih terjadi di berbagai negara, tidak hanya negara berkembang bahkan di negara maju kemiskinan juga merupakan suatu permasalahan yang sampai saat ini masih menjadi fokus utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kemiskinan yang telah berkembang secara terus menerus dapat diartikan karena adanya ketidakmampuan seseorang atau individu dalam memenuhi kebutuhan hidup baik berupa kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder (Zahara & Junaidi, 2018). Kemiskinan kerap kali berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia. Kemiskinan tersebut muncul sebagai akibat adanya sumber daya manusia yang tidak berkualitas, dalam hal ini kualitas sumber daya yang rendah sehingga dapat menjadi pemicu terjadinya kemiskinan.

Kemiskinan juga tidak terlepas dari adanya sebuah kebijakan publik karena kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks. Untuk itu diperlukan adanya rumusan kebijakan pengentasan kemiskinan supaya diperoleh pilihan program yang rasional. Dengan adanya kebijakan publik dalam hal penanggulangan kemiskinan dapat membantu masyarakat miskin untuk memenuhi hak yang selayaknya dimiliki oleh masyarakat ekonomi menengah ke atas lainnya. Inisiatif pemerintah dalam pembentukan kebijakan penanggulangan kemiskinan diharapkan dapat menjadi sebuah pandangan pemerintah untuk lebih memperhatikan masyarakatnya tidak hanya di pusat, tetapi juga di daerah-daerah terpencil sekalipun. Hal tersebut dilakukan agar perekonomian masyarakat di Indonesia dapat tumbuh dengan merata. Berikut dilampirkan data kemiskinan di Indonesia selama 15 tahun terakhir (tahun 2007- tahun 2022).

Grafik 1. 1 Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2007-2022



Sumber: Data diolah dari Badan Pusat Statistik, 2022.

Berdasarkan Grafik 1.1 di atas, dinamika tingkat kemiskinan tahun 2007 hingga tahun 2022 kemiskinan di Indonesia cenderung menurun. Kenaikan jumlah

penduduk miskin sebesar 4,28% terjadi pada tahun 2020 lebih besar dibandingkan kenaikan yang terjadi pada tahun 2019, yaitu sebesar 2,92%. Penyebab kenaikan jumlah penduduk miskin tersebut karena adanya pandemi covid-19 yang mengakibatkan terjadinya penurunan pendapatan masyarakat, konsumsi rumah tangga yang melambat, sektor pariwisata terpuruk, dan harga bahan pokok naik (Asmara, 2020). Namun, pada tahun 2021 jumlah kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan sebesar 3,81% setelah terjadi kenaikan pada tahun 2020. Pada tahun 2022 kembali mengalami penurunan sebesar 0,53%. Persentase penduduk miskin di Indonesia terus menurun sejalan dengan pemulihan ekonomi pasca covid.

Adanya penurunan angka kemiskinan pada tahun 2022 tersebut, masih tergolong kecil dan tingkat kemiskinan di Indonesia masih cukup tinggi. Oleh karena itu, dilihat dari kacamata administrasi publik persoalan kemiskinan selalu menjadi perhatian pemerintah pusat maupun daerah dari dulu hingga saat ini karena kemiskinan merupakan akar permasalahan sosial yang menjadi penyebab rendahnya kualitas hidup masyarakat terutama di tingkat pendidikan dan kesehatan.

Berbagai upaya sudah dilakukan oleh pemerintah yang dalam hal ini untuk mengatasi masalah kemiskinan serta sudah didukung dengan peraturan, di antaranya seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Kesejahteraan Sosial, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin, serta aturan lainnya. Namun, dalam pelaksanaannya diperlukan adanya

pengujian dan evaluasi karena masih banyak fenomena kemiskinan yang masih nampak banyak dijumpai (Alexandri, 2020).

Indonesia memiliki berbagai program penanggulangan kemiskinan. Program penanggulangan kemiskinan, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui adanya bantuan sosial (Arthamevia & Sukmana, 2022). Salah satu dari berbagai program yang telah dicanangkan oleh pemerintah Indonesia dalam rangka menanggulangi kemiskinan, yaitu Program Keluarga Harapan (PKH). Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH.

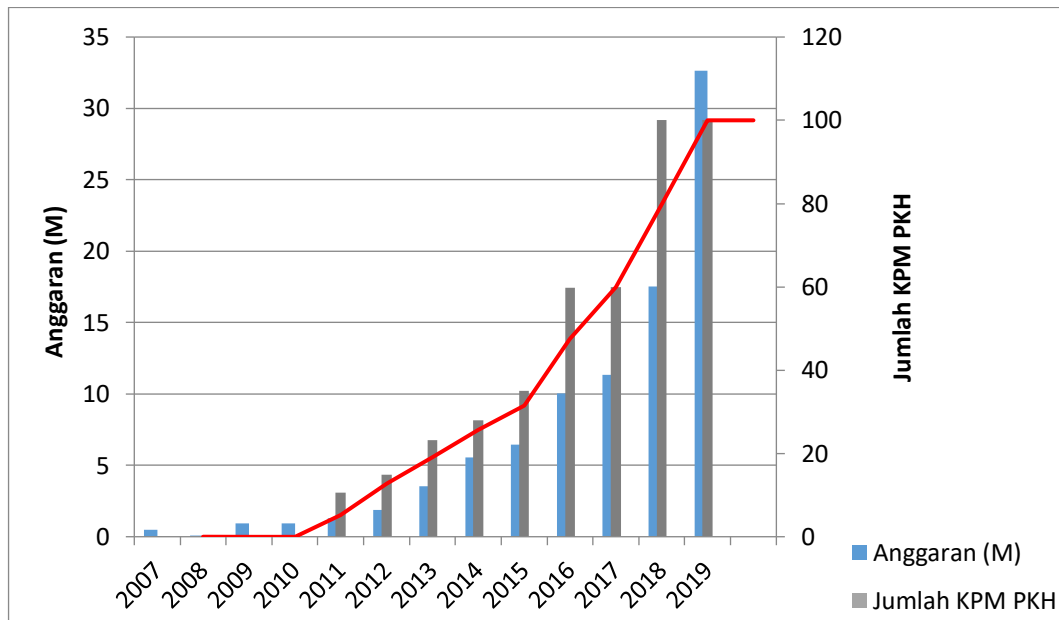
Dalam rangka upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH). Payung hukum Program Keluarga Harapan, yaitu Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan. Penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan sebagai salah satu upaya mengurangi kemiskinan dan kesenjangan dengan mendukung perbaikan aksesibilitas terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial guna meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin dan rentan Program Keluarga Harapan (Kementerian Sosial RI, 2019).

Berdasarkan pedoman umum pelaksanaan PKH tahun 2007 menurut Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 08/HUK/2007, Program Keluarga Harapan (PKH) mempunyai tujuan dan sasaran di antaranya, yaitu (Pedoman Program

Keluarga Harapan (PKH), 2019: 25-26) (a.) Meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. (b.) Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan. (c.) Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian keluarga penerima manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial. (d.) Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan; dan (e.) Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada keluarga penerima manfaat.

Berdasarkan tujuan di atas, pembentukan PKH sangatlah penting dalam upaya pengentasan kemiskinan yang sedang terjadi di Indonesia, dengan tujuan mengarah pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam jangka panjang dan mengurangi kesenjangan yang terjadi akibat kemiskinan. Jumlah penerima program PKH juga terus meningkat, sebagaimana nampak pada grafik 1.2 di bawah ini:

Grafik 1. 2 Jumlah Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Tahun 2007 – 2019 di Indonesia



Sumber: Data diolah dari Kementerian Sosial, 2019.

Dari Grafik 1.2 di atas, hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah melalui Kementerian Sosial serius dalam menangani masalah kemiskinan. Hal tersebut dilihat dari jumlah penerima Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan yang semakin bertambah setiap tahunnya seiring dengan peningkatan jumlah anggaran. Pada tahun 2018 dan tahun 2019 jumlah KPM PKH meningkat sebesar 40% dibandingkan pada tahun 2017. Anggaran pada tahun 2019 terlihat paling meningkat secara signifikan hingga 86,36% dibandingkan pada tahun 2018. Kenaikan besaran anggaran yang signifikan tersebut diharapkan terjadinya percepatan dalam penanganan kemiskinan di Indonesia, mengingat PKH menjadi program prioritas nasional karena dengan

penyaluran dana bantuan PKH kepada KPM PKH diharapkan mampu meningkatkan daya beli masyarakat sehingga memiliki dampak langsung yang sangat signifikan terhadap pengurangan kemiskinan dan kesenjangan.

Sejak diluncurkannya program tersebut pada tahun 2007, jumlah KPM PKH di Indonesia meningkat secara bertahap. Pada tahun 2007, Program Keluarga Harapan ini dilaksanakan secara berkelanjutan di tujuh provinsi yang ada di Indonesia, hingga pada tahun 2020 PKH sudah dapat dilaksanakan secara menyeluruh di 34 provinsi dan juga mencakup 514 kabupaten/kota dan 6.709 kecamatan (Kementerian Sosial RI, 2019). Berbagai wilayah di Indonesia telah melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai salah satu komitmen Pemerintah Pusat dan Daerah dalam menanggulangi kemiskinan di wilayahnya, salah satunya adalah Kota Semarang.

Tabel 1. 1 Jumlah Penduduk Miskin di 6 Kota Besar di Jawa Tengah Tahun 2021-2022

<b>Kota</b>	<b>Tahun 2021</b>	<b>Tahun 2022</b>
Magelang	9.270	9.440
Surakarta	47.030	48.780
Salatiga	9.690	10.140
Semarang	79.580	84.450
Pekalongan	22.160	23.490
Tegal	19.550	20.270

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2022.

Dari Tabel 1.1 di atas, menunjukkan bahwa Kota Semarang mengalami kenaikan dengan persentase tertinggi, yaitu sebesar 6,12% di antara lima kota besar yang ada di Jawa Tengah. Selanjutnya, jumlah kenaikan dengan persentase tertinggi penduduk miskin kedua, yaitu Kota Pekalongan sebesar 6%. Kemudian, disusul oleh Kota Salatiga sebesar 4,64%, Kota Surakarta sebesar 3,72%, Kota

Tegal sebesar 3,68%, dan yang paling terendah, yaitu Kota Magelang dengan persentase sebesar 1,83%. Padahal, Kota Semarang sebagai ibu kota provinsi Jawa Tengah yang merupakan pusat pemerintahan serta ekonomi. Kota Semarang juga dijadikan sebagai kiblat untuk daerah-daerah lain agar lebih maju, tetapi persoalan kemiskinan masih menjadi permasalahan bagi Kota Semarang.

Kenaikan jumlah penduduk miskin di Kota Semarang dinilai sangat signifikan diakibatkan oleh adanya pandemi covid-19 sehingga berdampak pada berbagai sektor kehidupan terutama pada sektor ekonomi. Banyak masyarakat Kota Semarang yang mengalami penurunan pendapatan hingga tidak sedikit dari mereka yang kehilangan mata pencahariannya. Dengan adanya fenomena tersebut membuat pemerintah perlu untuk melakukan suatu tindakan agar kesejahteraan penduduk miskin dapat meningkat.

Kota Semarang merupakan salah satu kota dengan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) tertinggi di antara enam kota se-Jawa Tengah lainnya, yaitu sebesar 28.077 keluarga (KompasTv-Jateng, 2023). Program Bantuan Sosial PKH di Kota Semarang sudah berjalan mulai tahun 2013 sampai dengan sekarang yang telah menjangkau ke kecamatan hingga kelurahan. Salah satunya, yaitu wilayah yang ada di Kecamatan Semarang Timur yang menjadi sasaran dengan harapan ke depannya dapat menjadi program yang membantu Pemerintah Kota Semarang dalam menanggulangi dan mengentaskan kemiskinan.



Wilayah Kecamatan Semarang Timur menjadi salah satu kecamatan yang masuk ke dalam wilayah prioritas penanggulangan kemiskinan di Kota Semarang, wilayah tersebut menjadi prioritas pemerintah Kota Semarang dalam hal pengentasan kemiskinan karena rendahnya pendapatan masyarakat, pengangguran, dan tingginya jumlah anak tidak sekolah (Tribun Jateng, 2022). Kecamatan Semarang Timur juga merupakan wilayah dengan lingkungan permukiman kumuh di Kota Semarang karena terdapat berbagai permasalahan yang ada di wilayah tersebut, yaitu kemiskinan dan kesenjangan sebagai akibat dari rendahnya penghasilan masyarakat sehingga untuk memenuhi kebutuhan pun juga seadanya (Yusman & Kumala, 2018).

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di wilayah Kecamatan Semarang Timur merupakan pilihan yang tepat bagi pemerintah sebagai upaya penanggulangan kemiskinan. Menurut data dari Dinas Sosial Kota Semarang, jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada tahun 2021 sebanyak 1.555 KPM PKH, sedangkan pada tahun 2022 mengalami peningkatan, yaitu menjadi sebanyak 1.961 KPM PKH atau mengalami peningkatan sebesar 26,10%. Wilayah Kecamatan Semarang Timur terbagi menjadi 10 kelurahan, tetapi terdapat dua kelurahan yang dipilih oleh Pemerintah Kota Semarang sebagai daerah prioritas penanggulangan kemiskinan, yaitu Kelurahan Rejosari dan Kelurahan Kemijen (Tribun Jateng, 2022).

Tabel 1.2 Jumlah Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Semarang Timur Tahun 2022

No.	Kelurahan	Jumlah Penerima PKH
1.	Kelurahan Bugangan	220
2.	Kelurahan Karangtempel	22
3.	Kelurahan Karangturi	90
4.	Kelurahan Kebonagung	120
5.	Kelurahan Kemijen	372
6.	Kelurahan Mlatibaru	89
7.	Kelurahan Mlatiharjo	119
8.	Kelurahan Rejomulyo	143
<b>9.</b>	<b>Kelurahan Rejosari</b>	<b>544</b>
10.	Kelurahan Sarirejo	242
	Jumlah	1.961

Sumber: Data SP2D PKH Kecamatan Semarang Timur, 2022.

Berdasarkan Tabel 1.2 di atas, menunjukkan bahwa Kelurahan Rejosari merupakan kelurahan yang paling banyak menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dibandingkan dengan kelurahan lainnya atau sebanyak 27,75% dari jumlah keseluruhan KPM PKH di Kecamatan Semarang Timur. Hal tersebut disebabkan karena Kelurahan Rejosari merupakan kelurahan dengan banyak warga yang kurang mampu dan memiliki tingkat kemiskinan yang terbilang tinggi di antara kelurahan lainnya sehingga masih banyak masyarakat di sana yang membutuhkan bantuan dari pemerintah tersebut. Dengan demikian, pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Rejosari merupakan sebuah solusi dari pemerintah untuk menanggulangi permasalahan kemiskinan. Keberjalanan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Rejosari sendiri diharapkan dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan.

Pentingnya evaluasi kebijakan terhadap Program Keluarga Harapan telah dibahas dalam penelitian-penelitian terdahulu. (Rengkuan et al., 2022), dalam penelitiannya yang berjudul “Evaluasi Program Keluarga Harapan Di Kelurahan Tataaran I, Kecamatan Tondano Selatan, Kabupaten Minahasa”, menemukan fakta bahwa bantuan PKH tidak tepat sasaran karena data yang ada di pusat dan daerah tidak sinkron dan juga tidak adanya pembaharuan data. Selain itu, (Sari & Marom, 2019) dalam penelitian mereka yang berjudul “Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Rangka Mengatasi Permasalahan Pendidikan dan Kesehatan di Semarang Utara Kota Semarang” menjabarkan bahwa proses pendataan peserta penerima PKH belum berjalan dengan baik. Akibatnya adalah masyarakat yang semestinya masuk dalam kriteria penerima PKH, tetapi belum mendapatkan bantuan.

Situasi yang berbeda, dijabarkan oleh (Herliani & Setiawati, 2022) dalam penelitian mereka yang berjudul “Evaluasi Program Keluarga Harapan Bidang Pendidikan di Desa Lumbang Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong”, di mana pelaksanaan PKH di Desa Lumbang telah berjalan dengan baik dan dikategorikan cukup berhasil yang dibuktikan dengan proses penyaluran bantuan berjalan lancar dan dengan adanya bantuan ini dapat merubah pola pikir atau mindset peserta PKH. Selanjutnya, (Prayitna et al., 2018) dalam penelitiannya yang berjudul “Evaluasi Program Keluarga Harapan dalam Meningkatkan Keberdayaan Perempuan di Bidang Pendidikan dan Kesehatan di Kabupaten Ponorogo” mengungkap bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Ponorogo telah mampu menambah tingkat kesejahteraan pesertanya,

meningkatkan akses dan kehadiran di sekolah dan layanan kesehatan, memberikan penyadaran adanya diskriminasi gender, dan meningkatkan partisipasi terhadap program.

Evaluasi terhadap program ini perlu dilakukan agar apa yang menjadi tujuan program dalam rangka memberikan pelayanan bantuan kepada masyarakat dapat diwujudkan dengan baik khususnya persoalan kemiskinan yang masih menjadi permasalahan utama di Kelurahan Rejosari. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kelurahan Rejosari, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di latar belakang maka terdapat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana evaluasi pelaksanaan Program Keluarga Harapan dalam menanggulangi kemiskinan di Kelurahan Rejosari Kota Semarang?
2. Apa saja hambatan dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kelurahan Rejosari Kota Semarang?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah di atas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan Program Keluarga Harapan dalam menanggulangi kemiskinan di Kelurahan Rejosari Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang dan untuk mengidentifikasi hambatan apa saja yang terjadi pada

saat pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kelurahan Rejosari Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian merupakan dampak pencapaian dari sebuah tujuan. Melalui uraian serta pembahasan yang ada dalam penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi berbagai pihak, antara lain :

##### **1. Kegunaan Ilmiah**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu administrasi publik terutama mengenai studi kebijakan publik di bidang sosial serta dapat dijadikan referensi untuk melakukan penelitian lanjutan terkait topik dalam penelitian ini.

##### **2. Kegunaan Praktis**

###### **a. Bagi Peneliti**

Penelitian ini bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan, menambah wawasan, dan pengalaman bagi peneliti sendiri. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan ajar dan acuan dalam ilmu metode penelitian dan dapat dijadikan sebagai perbandingan penelitian selanjutnya.

###### **b. Bagi Masyarakat**

Penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai evaluasi pelaksanaan dari Program Keluarga Harapan (PKH) yang diterapkan oleh Dinas Sosial Kota Semarang terutama pada pelaksanaan Program Keluarga

Harapan (PKH) di Kelurahan Rejosari sehingga mempermudah masyarakat untuk memperoleh informasi dan pelayanan yang diberikan.

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar masukan Dinas Sosial Kota Semarang dalam memberikan masukan kepada Kementerian Sosial Pusat dalam pengembangan Program Keluarga Harapan di masa selanjutnya.

## 1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

### 1.5.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 1.3 Penelitian Terdahulu

No.	Nama, Judul Artikel, Tahun	Tujuan	Hasil Penelitian
<i>Evaluasi Kebijakan Program Keluarga Harapan</i>			
1	Zahara & Junaidi, (2018)  Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Mengurangi Kemiskinan di Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara.	Untuk mengetahui dan mendeskripsikan evaluasi Program Keluarga Harapan dan hambatan yang terjadi dalam evaluasi Program Keluarga Harapan dalam mengurangi kemiskinan di Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara.	Evaluasi pelaksanaan PKH di Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara belum terwujud secara efektif, masih terdapat RTSM yang belum mendapatkan bantuan, masalah data yang kurang tepat di lapangan, kendala pencairan dana, KPM tidak sosialisasi atau pertemuan rutin, serta bantuan PKH digunakan untuk keperluan lainnya.
2.	Alexandri, M. B, (2020).  Evaluasi Kebijakan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Cakung Jakarta Timur Tahun 2019.	Untuk menganalisis Program Keluarga Harapan khususnya di Kecamatan Cakung Jakarta Timur.	Program Keluarga Harapan di Kecamatan Cakung Jakarta Timur telah cukup berhasil dan efektif sebagai salah satu upaya dalam pengentasan kemiskinan.

3	Arthamevia, N., & Sukmana, H. (2022).  Analisis Evaluasi Program Keluarga Harapan di Kabupaten Sidoarjo.	Untuk menganalisis Program Keluarga Harapan di Kabupaten Sidoarjo.	Program Keluarga Harapan di Kabupaten Sidoarjo belum dikatakan berhasil, hal tersebut karena bantuan pada penerima PKH masih belum tepat dan kegiatan sosialisasi belum terlaksana.
4	Rengkuan et al., (2022)  Evaluasi Program Keluarga Harapan di Kelurahan Tataaran I Kecamatan Tondano Selatan Kabupaten Minahasa.	Untuk mendeskripsikan evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Tataaran I, Tondano Selatan, Minahasa.	Program Keluarga Harapan di Tataaran I, Tondano Selatan, Minahasa belum berhasil karena bantuan PKH tidak tepat sasaran, penyaluran bantuan tidak tepat waktu, masih banyak masyarakat yang terus menerima bantuan ini sehingga program ini tidak berhasil karena tidak mampu mengubah taraf hidup masyarakat sehingga program berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
5	Sari, A.G., & Marom, A., (2019)  Evaluasi Program Keluarga Harapan Dalam Rangka Mengatasi Permasalahan Pendidikan dan Kesehatan di Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang.	Untuk mengevaluasi Program Keluarga Harapan dalam rangka mengatasi permasalahan pendidikan dan kesehatan di Semarang Utara Kota Semarang dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi.	Program Keluarga Harapan di Semarang Utara Kota Semarang belum dapat dilakukan dengan baik. Faktor pendukung dalam kebijakan ini adalah komunikasi, sumber daya manusia dan anggaran, disposisi, struktur organisasi dan faktor penghambat adalah sumber daya fasilitas.
6	Herliani & Setiawati, (2022)  Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Bidang Pendidikan di Desa Lumbang Kecamatan	Untuk mengetahui dan menganalisis evaluasi pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) bidang Pendidikan.	Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) bidang pendidikan di Desa Lumbang Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong dikategorikan Cukup Berhasil dengan

	Muara Uya Kabupaten Tabalong.		persentase 44,09%. Hal tersebut dibuktikan dengan proses penyaluran bantuan berjalan lancar dan dengan adanya bantuan ini dapat merubah pola pikir atau <i>mindset</i> peserta PKH
7	Prayitna et al., (2018)  Evaluasi Program Keluarga Harapan dalam Meningkatkan Keberdayaan Perempuan di Bidang Pendidikan dan Kesehatan di Kabupaten Ponorogo.	Untuk mengetahui bagaimana implementasi PKH di Kabupaten Ponorogo dan apakah PKH telah meningkatkan keberdayaan Perempuan Peserta PKH.	Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kabupaten Ponorogo telah mampu menambah tingkat kesejahteraan pesertanya, meningkatkan akses dan kehadiran di sekolah dan layanan kesehatan, memberikan penyadaran adanya diskriminasi gender, meningkatkan partisipasi terhadap program.
<i>Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH)</i>			
1.	Putri & Purnaweni, (2022)  Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Bojonegoro	Untuk mengetahui pelaksanaan PKH di Kecamatan Bojonegoro.	Pelaksanaan PKH di Kecamatan Bojonegoro sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Namun, ditemukan beberapa permasalahan yang mempengaruhi kualitas pelaksanaan PKH, yaitu kurangnya informasi terkait penyaluran bantuan, kurangnya pengetahuan KPM tentang tujuan PKH, dan distribusi bantuan yang tidak merata.
2.	Fachrudin et al., (2017)  Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Wonosobo Tahun 2015-2017	Untuk mendeskripsikan implementasi PKH dan untuk menemukan faktor pendukung dan penghambat serta solusi untuk mengatasi pelaksanaan PKH di Kabupaten Wonosobo.	Pelaksanaan PKH di Kabupaten Wonosobo masih ditemukan adanya kendala-kendala yang sifatnya teknis, yaitu pendataan peserta PKH belum menyeluruh dan kurangnya tenaga



			pendamping. Komitmen dan dukungan dari semua pihak sangat diperlukan guna mengurangi beban kemiskinan di Wonosobo.
<i>Efektivitas Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH)</i>			
1.	Nabila, R., et al., (2023)  Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Dalam Upaya Menanggulangi Kemiskinan Pada Masa Pandemi di Desa Jatibarang Lor Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes Tahun 2021	Untuk menganalisis sejauh mana efektivitas dan hambatan pelaksanaan PKH dalam menanggulangi kemiskinan pada masa pandemi di Desa Jatibarang Lor Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes.	Pelaksanaan PKH di Desa Jatibarang Lor Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes belum sepenuhnya efektif. Adapun hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan PKH, yaitu terkait kevalidan data DTKS yang diolah oleh pemerintah desa.
2.	Nurul, N., & Lestari, H., (2019)  Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang	Untuk menganalisis efektivitas PKH di Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang.	Pelaksanaan PKH di Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang masih terdapat kendala, yaitu tidak adanya koordinasi pada pengelolaan data sasaran PKH oleh pemangku kepentingan (Dinas Sosial Kota Semarang, UPPKH Kota Semarang, pendamping PKH, dan pejabat setempat, yaitu kelurahan, RT dan RW).
3.	Yolanita, R., & Yuniningsih, T., (2020)  Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Gayamsari Kota Semarang	Untuk menganalisis efektivitas PKH di Kecamatan Gayamsari Kota Semarang.	Pelaksanaan PKH di Kecamatan Gayamsari Kota Semarang belum efektif, hambatan yang muncul dalam pelaksanaan PKH, yaitu munculnya kecemburuan sosial dan masih adanya KPM yang tidak menjalankan kewajibannya.

Berdasarkan Tabel 1.3 penelitian terdahulu di atas yang digunakan sebagai acuan penelitian terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian-penelitian sebelumnya dengan penelitian ini. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, yaitu mengkaji terkait evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah lokus penelitian, tahun penelitian, dan teori penelitian.

### **1.5.2 PKH dalam Administrasi Publik**

Chandler dan Plano (dalam Deddy Mulyadi, 2015) administrasi publik adalah suatu proses dimana sumber daya serta personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasi, mengimplementasi, mengevaluasi, serta mengelola sebuah keputusan dalam kebijakan publik. Perkembangan ilmu administrasi publik sangat dinamis dan berkembang seiring dengan perkembangan dan perubahan sosial. Administrasi publik diselenggarakan dalam rangka memenuhi kebutuhan publik, mengingat kebutuhan publik terus meningkat dan semakin kompleks sehingga berkembanglah penelitian administrasi publik pada dua konsentrasi, yaitu manajemen publik dan kebijakan publik.

Dalam penelitian ini berfokus pada kebijakan publik karena pada dasarnya kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan permasalahan publik. Seperti pada penelitian ini, Program Keluarga Harapan termasuk salah satu kebijakan publik sebagai suatu tindakan atau tanggapan pemerintah dalam rangka menanggulangi kemiskinan yang masih menjadi

permasalahan sosial dari dulu hingga sekarang. Dalam kebijakan publik terdiri dari beberapa tahapan, yaitu penyusunan kebijakan, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Oleh karena itu, PKH sebagai suatu kebijakan dalam rangka menanggulangi kemiskinan diperlukan adanya evaluasi agar dapat mengetahui apakah kebijakan mengalami keberhasilan dengan kata lain apa yang menjadi tujuan dalam kebijakan dapat tercapai atau malah justru mengalami kegagalan.

### **1.5.3 PKH dalam Kebijakan Publik**

Menurut Santoso (dalam Anggara, 2018) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah tujuan tertentu atau serangkaian prinsip atau tindakan yang dilakukan oleh pemerintah pada saat tertentu dalam hubungannya terhadap suatu subjek atau tanggapan dari suatu krisis. Salah satu permasalahan kompleks yang terjadi di Indonesia, yaitu kemiskinan. Angka kemiskinan di Indonesia masih tinggi seiring dengan adanya ledakan pertumbuhan penduduk. Fenomena tersebut menjadi fokus utama bagi pemerintah untuk melakukan suatu tindakan dalam merespon adanya permasalahan tersebut. Dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan di Indonesia, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Sosial mengeluarkan suatu kebijakan publik, yaitu Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH). Suatu kebijakan publik harus mampu memenuhi salah satu syarat utama, yaitu memberi harapan. Oleh karena itu, kebijakan yang telah dicanangkan oleh pemerintah Indonesia diharapkan dapat mencapai harapan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari kebijakan publik tersebut.

#### **1.5.4 PKH dalam Evaluasi Kebijakan Publik**

Evaluasi kebijakan publik merupakan bagian dari sebuah proses kebijakan publik. Sebagian besar para ahli kebijakan publik menyatakan bahwa evaluasi merupakan tahapan terakhir dari suatu proses kebijakan. Menurut Mustofadijaja (dalam Widodo, 2007: 113), evaluasi merupakan suatu proses penilaian terhadap peristiwa yang mempunyai pertimbangan nilai tertentu. Kemudian, menurut Lester dan Stewart (dalam Winarno, 2007: 166) bahwa evaluasi kebijakan memiliki dua tugas yang berbeda, yaitu menentukan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampaknya, dan yang kedua, yaitu menilai keberhasilan ataupun kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan tujuan, standar atau kriteria yang telah ditetapkan.

Menurut Muhadjir (dalam Widodo, 2007: 112) menyatakan bahwa evaluasi memiliki kegunaan untuk memantau proses selama pelaksanaan kebijakan apakah kebijakan tersebut sudah dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis atau tidak. Menurut Weiss (dalam Widodo, 2007: 114) mengemukakan bahwa evaluasi memiliki fungsi dalam melakukan pengukuran terhadap pencapaian dari suatu program yang berdasar pada tujuan yang ingin dicapai. Akbar dan Mohi (2018) mengemukakan evaluasi kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencari informasi yang berhubungan dari hasil implementasi kebijakan secara keseluruhan, selanjutnya melakukan penilaian terhadap hasil dari kebijakan tersebut apakah baik dalam hal pelaksanaan, manfaat untuk dijadikan bahan rekomendasi pada kebijakan selanjutnya.

Berdasarkan definisi evaluasi kebijakan publik di atas, dapat disimpulkan bahwa evaluasi kebijakan publik adalah suatu kegiatan dalam rangka menilai ataupun melihat keberhasilan dan kegagalan sebagai akibat dari pelaksanaan suatu kebijakan publik. Setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah diperlukan adanya evaluasi supaya kebijakan tersebut diketahui apakah sudah mencapai tujuan yang diharapkan. Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka mengurangi kemiskinan di Indonesia. Program Keluarga Harapan (PKH) sudah berjalan sejak tahun 2007 hingga saat ini, tentunya kebijakan tersebut diperlukan evaluasi agar apa yang menjadi target dan tujuan dalam Program Keluarga Harapan dapat terwujud dengan baik.

#### **1.5.5 Tujuan dan Fungsi Evaluasi Kebijakan**

Menurut Subarsono (2005: 120-121) bahwa terdapat enam tujuan dari evaluasi kebijakan, antara lain:

1. Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan, jadi dari adanya evaluasi kebijakan adalah bertujuan untuk mengetahui pencapaian tujuan dan sasaran dari kebijakan.
2. Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan, jadi dari adanya evaluasi dapat mengetahui berapa biaya dan juga manfaat dari adanya suatu kebijakan.
3. Mengukur tingkat keluaran (*outcome*) suatu kebijakan, jadi dengan adanya evaluasi kebijakan dapat mengetahui seberapa besar dan juga mengetahui kualitas *output* dari adanya suatu kebijakan.

4. Mengukur dampak kebijakan, jadi dengan adanya evaluasi juga untuk melihat adanya dampak yang ditimbulkan dari adanya kebijakan yang meliputi dampak positif maupun negatif.
5. Mengetahui adanya penyimpangan, jadi dengan adanya evaluasi kebijakan dapat diketahui adanya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dengan melihat hasil dari perbandingan antara apa yang menjadi tujuan dan sasaran dengan pencapaian target.
6. Bahan masukan untuk kebijakan yang akan datang, jadi tujuan akhir dari adanya evaluasi kebijakan untuk memberikan masukan bagi proses kebijakan kedepannya agar menghasilkan kebijakan yang lebih baik.

Menurut Wibawa (dalam Nugroho, 2004: 186) terdapat empat fungsi dari evaluasi kebijakan, yaitu:

1. Eksplanasi berkenaan dengan menjelaskan realitas pelaksanaan program serta menyimpulkan keterkaitan antara dimensi-dimensi yang diamati.
2. Kepatuhan berkenaan dengan mengamati suatu tindakan yang diambil oleh pejabat pemerintahan ataupun aktor lain agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Audit berkenaan dengan mengetahui hasil akhir dari kebijakan telah sampai kepada kelompok yang menjadi sasaran.
4. Akunting berkenaan dengan mengetahui dampak sosial maupun ekonomi dari adanya suatu kebijakan.

### 1.5.6 Tipe Evaluasi Kebijakan

Dalam metode riset evaluasi dibagi menjadi dua macam, yaitu deskriptif dan kausal. Deskriptif berkenaan dengan evaluasi proses implementasi kebijakan publik, sedangkan kausal berkenaan dengan evaluasi hasil dari adanya implementasi kebijakan publik. Metode deskriptif dilakukan pada saat sulit dalam menemukan hubungan sebab akibat dan untuk menilai sejauh mana pencapaian dari suatu program. Selain itu, metode deskriptif juga untuk menilai manfaat yang dihasilkan terhadap sasaran. Metode kausal berkenaan dengan masalah sebab akibat dan metode ini digunakan untuk mengetahui apakah pelaksanaan program yang dijalankan menjadi penyebab dari dampak yang diinginkan.

Rossi (dalam Widodo, 2007) menyatakan bahwa terdapat lima riset evaluasi kebijakan, yaitu sebagai berikut:

1. *Research for Program Planning and Development*, merupakan riset yang bertujuan untuk menyusun kebijakan agar berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan.
2. *Project Monitoring Evaluation Research*, merupakan riset yang bertujuan untuk menguji ketepatan pelaksanaan kebijakan.
3. *Impact Evaluation*, merupakan riset yang bertujuan untuk menguji efektivitas dari kebijakan, menentukan penyebab perubahan, dan tingkat pencapaian tujuan kebijakan dalam rangka untuk menilai perubahan yang terjadi setelah adanya kebijakan.

4. *Economic Efficiency Evaluation*, riset yang bertujuan untuk menghitung efisiensi biaya kebijakan baik dari besaran biaya hingga manfaat yang dihasilkan dari penggunaan biaya tersebut.
5. *Comprehensive Evaluation*, riset yang bertujuan memastikan pentingnya kebijakan dilakukan, menilai perubahan dari adanya kebijakan, juga untuk mengetahui ketepatan penggunaan biaya.

Apabila dikaitkan dengan konsep yang dikemukakan oleh Rossi (dalam Widodo, 2007) mengenai tipe evaluasi kebijakan maka dalam penelitian ini menekankan pada tipe *Project Monitoring Evaluation Research*, yaitu penelitian evaluasi untuk menguji ketepatan pelaksanaan kebijakan yang dalam hal ini adalah pelaksanaan PKH di Kelurahan Rejosari Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang apakah pelaksanaan PKH sudah sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang telah ditetapkan.

#### **1.5.7 Kriteria Indikator Evaluasi Kebijakan Publik**

Untuk menilai keberhasilan suatu kebijakan perlu dikembangkan beberapa indikator. Bridgman & Davis (dalam Abdulkahar & Yuwono, 2002: 138-139) mengemukakan empat indikator atau kriteria evaluasi kebijakan, yaitu:

##### *a. Input*

Indikator ini berkenaan dengan penilaian apakah sumber daya pendukung serta bahan-bahan dasar yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan, meliputi sumber daya manusia, uang, dan infrastruktur lainnya.



b. *Process*

Indikator ini berkenaan dengan penilaian atau pengukuran sejauhmana program ditransformasikan dalam bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat.

c. *Output* (hasil)

Indikator ini berkenaan dengan hasil capaian dari program yang telah dilaksanakan.

d. *Outcomes* (dampak)

Indikator ini berkenaan dengan dampak atau manfaat program kebijakan yang dirasakan oleh masyarakat luas atau kelompok sasaran.

Dalam pelaksanaan suatu kebijakan pemerintah, konsep *input*, *process*, *output*, dan *outcome* memiliki keterkaitan yang erat serta menjadi sesuatu yang penting dalam pelaksanaan kebijakan. Di mana *input* mencakup semua sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, seperti anggaran, sumber daya manusia, dan infrastruktur. *Input* yang memadai dan tepat menjadi dasar yang penting untuk menjalankan proses pelaksanaan kebijakan pemerintah dengan baik. *Process* dalam pelaksanaan kebijakan melibatkan cara bagaimana sumber daya tersebut digunakan, diatur dan dikelola yang mencakup perencanaan, koordinasi dan pelaksanaan kegiatan yang diarahkan untuk mencapai tujuan kebijakan. *Process* yang baik memastikan bahwa *input* yang tersedia dimanfaatkan secara efisien. Kemudian, *output* merupakan hasil langsung dari kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan kebijakan melalui penggunaan sumber daya dan *process* yang telah dilakukan. *Outcome* merupakan dampak

yang diharapkan dari adanya pelaksanaan kebijakan. *Outcome* yang dicapai akan menjadi penilaian akhir atas keberhasilan kebijakan dan akan memberikan gambaran yang jelas terkait dampak nyata yang telah dihasilkan. Dengan demikian, keempat indikator tersebut akan membantu pemerintah untuk memahami efektivitas kebijakan, memperbaiki proses pelaksanaan dan memastikan bahwa hasil yang diinginkan dapat tercapai dengan baik.

### **1.5.8 Program Keluarga Harapan**

Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan ditetapkan untuk mendukung pelaksanaan penyaluran program perlindungan sosial yang terencana, terarah, dan berkelanjutan dalam bentuk Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai bantuan sosial bersyarat yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran dan peningkatan pendapatan keluarga miskin dan rentan (Permensos, 2018). Penyaluran bantuan sosial PKH sebagai salah satu upaya mengurangi kemiskinan dan kesenjangan dengan mendukung perbaikan aksesibilitas terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial guna meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin dan rentan.

Bantuan sosial Program Keluarga Harapan berupa uang kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan rentan. Program Keluarga Harapan memiliki tujuan sebagai berikut 1) Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial yang akan meningkatkan taraf

hidup Keluarga Penerima Manfaat; 2) Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan sehingga akan mengurangi kemiskinan dan kesenjangan.

Sasaran Program Keluarga Harapan merupakan keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (DTPFM dan OTM) yang memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Kriteria komponen penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan adalah sebagai berikut:

- a. Kriteria Komponen Kesehatan meliputi:
  - 1) Ibu hamil/menyusui; dan
  - 2) Anak berusia 0 sampai dengan 6 tahun.
- b. Kriteria Komponen Pendidikan meliputi:
  - 1) Anak sekoah dasar/madrasah ibtidaiyah atau sederajat;
  - 2) Anak sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah atau sederajat;
  - 3) Anak sekolah menengah atas/madrasah aliyah atau sederajat; dan
  - 4) Anak usia 6 sampai dengan 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun.
- c. Kriteria komponen kesejahteraan sosial meliputi:
  - 1) Lanjut usia mulai dari 70 tahun; dan
  - 2) Penyandang disabilitas berat.

Bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) terbagi menjadi dua jenis, yaitu bantuan tetap dan bantuan komponen yang diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bantuan Tetap untuk Setiap Keluarga
  - a) Reguler : Rp. 550.000. / keluarga / tahun.
  - b) PKH Akses : Rp. 1.000.000. / keluarga / tahun.
2. Bantuan Komponen untuk Setiap Jiwa dalam Keluarga PKH
  - a) Ibu hamil : Rp. 2.400.000.
  - b) Anak usia dini : Rp. 2.400.000.
  - c) SD : Rp. 900.000.
  - d) SMP : Rp. 1.500.000.
  - e) SMA : Rp. 2.000.000.
  - f) Disabilitas berat : Rp. 2.400.000.
  - g) Lanjut usia : Rp. 2.400.000.

Adapun alur atau proses pelaksanaan Program Keluarga Harapan yang mengacu pada Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan yang terdiri dari beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut:

1. Perencanaan, dalam tahapan ini adalah penentuan lokasi dan jumlah calon KPM. Data lokasi dan jumlah calon KPM tersebut berasal dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
2. Pertemuan awal dan validasi, dalam tahapan ini adalah melakukan adanya sosialisasi dalam rangka pemberian pemahaman kepada calon KPM PKH.

3. Penetapan KPM PKH, dalam tahapan ini adalah menetapkan data KPM PKH PKH yang merupakan hasil pemutakhiran data dan data yang berasal dari validasi calon KPM PKH sesuai dengan kriteria kepesertaan.
4. Penyaluran bantuan sosial, dalam tahapan ini adalah pelaksanaan pencairan dana bantuan sosial PKH melalui buku tabungan atau Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)
5. Pendampingan, tahapan ini merupakan tahapan yang penting dilakukan dalam rangka mencapai salah satu tujuan PKH, yaitu menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian terhadap KPM PKH dalam pemanfaatan layanan fasilitas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.

#### **1.5.9 Kemiskinan**

Menurut Mukherjee dan Carriere (2002) (dalam Tantoro & Zulkarnain, 2014) kemiskinan merupakan suatu keadaan seseorang mengalami berbagai ancaman untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Hal ini termasuk tidak cukupnya penggunaan, kelemahan, pendidikan yang rendah, kesehatan yang tidak memadai, minimnya kebutuhan yang diperlukan sehari-hari, serta kurangnya peluang untuk mengambil bagian dalam kehidupan sosial dan politik.

Menurut Munkner dan Walter (2001) (dalam Adawiyah, 2020), kemiskinan ditimbulkan oleh faktor-faktor penyebab dan dimensi-dimensi yang berbeda-beda. Beberapa sudut pandang tentang penyebab kemiskinan, yaitu : (a) rendahnya sumber daya dan persyaratan-persyaratan perdagangan yang tidak menguntungkan dipandang sebagai penyebab utama kemiskinan, maka

peningkatan produktivitas, akses ke pasar, harga yang wajar untuk produk-produk yang dihasilkan oleh kaum miskin merupakan langkah yang tepat dalam memberantas kemiskinan; (b) buruknya kondisi lingkungan alam dipandang sebagai penyebab krusial dari meluasnya kemiskinan, maka penggunaan sumber daya alam yang lebih bijaksana dan praktik-praktik yang berorientasi ekologis merupakan jalan keluarnya; (c) rendahnya tingkat pengetahuan dan akses kepada informasi, pendidikan, pelatihan dan bimbingan sebagai penyebab kemiskinan, maka pengembangan sumber daya manusia menjadi cara untuk mengatasi kemiskinan.

## **1.6 Operasionalisasi Konsep**

Keberhasilan suatu kebijakan dapat dilihat dari perolehan hasil yang dicapai maupun bagaimana kebijakan tersebut dilaksanakan dengan asumsi bahwa kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah sudah secara tepat dijalankan sesuai dengan pedoman dan tujuan yang telah ditetapkan.

### **1.6.1 Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kelurahan Rejosari Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang**

Evaluasi merupakan suatu prosedur yang penting untuk dilakukan untuk mengetahui hasil dari suatu program kebijakan yang dijalankan. Dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kelurahan Rejosari Kota Semarang, peneliti menggunakan kriteria evaluasi yang

dikemukakan oleh Bridgman & Davis (dalam Abdulkahar & Yuwono, 2002: 138-139), yaitu sebagai berikut:

### 1. *Input*

Input dalam penelitian ini memfokuskan pada penilaian sumber daya yang digunakan sebagai penunjang pelaksanaan PKH dalam mencapai tujuan dari suatu program.

Adapun gejala yang akan diteliti dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

- a. Sumber Daya Manusia (SDM)
- b. Sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan PKH

### 2. *Process*

Dalam penelitian ini dilihat apakah proses atau alur pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kelurahan Rejosari Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang sudah sesuai dengan pedoman pelaksanaan sebagaimana dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan.

Adapun gejala yang diteliti dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

- a. Perencanaan (penentuan lokasi dan jumlah calon KPM PKH)
- b. Pelaksanaan validasi data
- c. Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan
- d. Penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan
- e. Pendampingan

### 3. *Output* (hasil)

Dalam penelitian ini dilihat apakah hasil dari pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kelurahan Rejosari Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang sudah mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan.

Adapun gejala yang diteliti dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

- a. Dana bantuan PKH diharapkan mampu untuk mengurangi kemiskinan.
- b. Dana bantuan PKH mampu untuk mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga.
- c. Dana bantuan PKH dapat meningkatkan KPM dalam memanfaatkan akses fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah.

### 4. *Outcomes* (dampak)

Dalam penelitian ini dilihat dampak dari pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kelurahan Rejosari Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang yang meliputi dampak positif dan dampak negatif.

## **1.6.2 Hambatan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kelurahan Rejosari Kota Semarang**

Hambatan dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kelurahan Rejosari Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang dikaji berdasarkan hasil temuan pada penelitian terdahulu. Dari hasil temuan penelitian terdahulu tersebut bertujuan mengidentifikasi bukti-bukti yang ada tentang hambatan yang terjadi



pada pelaksanaan PKH, apakah juga terjadi pada pelaksanaan PKH di Kelurahan Rejosari. Hasil temuan penelitian terdahulu mengungkapkan bahwa hambatan yang sering muncul pada saat pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH), yaitu kendala teknis yang meliputi proses pencairan dana, banyak warga yang belum terdata pada program PKH. Selain itu, masih banyak warga yang tidak mematuhi kewajiban sebagai KPM PKH, yaitu tidak mengikuti sosialisasi atau pertemuan rutin bulanan dan masih adanya warga yang tidak tepat dalam menggunakan dana bantuan dari yang seharusnya.

### **1.7 Argumen Penelitian**

Kemiskinan telah menjadi masalah yang penting saat ini di Indonesia sehingga menjadi suatu fokus perhatian bagi pemerintah Indonesia. Masalah kemiskinan yang ada di Indonesia merupakan masalah sosial yang senantiasa relevan untuk dikaji secara terus menerus. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dengan jumlah penduduk yang terus meningkat sehingga tingkat kesejahteraan rakyatnya masih jauh dibawah tingkat kesejahteraan masyarakat di negara-negara maju. Tak terkecuali di Kota Semarang, dalam kurun waktu selama dua tahun berturut-turut jumlah penduduk miskin yang ada di Kota Semarang semakin naik, yaitu pada tahun 2020 sebanyak 71.97 ribu jiwa, pada tahun 2021 sebanyak 79.58 ribu jiwa, dan pada tahun 2022 jumlah penduduk miskin di Kota Semarang sebanyak 84.45 ribu jiwa.

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan. Seluruh wilayah di Kota Semarang

telah melaksanakan program tersebut sejak tahun 2013 termasuk Kelurahan Rejosari. Diketahui bahwa Kelurahan Rejosari merupakan salah satu kelurahan yang menjadi prioritas penanggulangan kemiskinan oleh Pemerintah Kota Semarang. Dengan adanya pelaksanaan PKH di Kelurahan Rejosari sebagai program pengentasan kemiskinan diharapkan dapat memberikan hasil yang positif dalam menanggulangi kemiskinan. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas mengenai evaluasi pelaksanaan PKH yang diterapkan di Kelurahan Rejosari dan mengidentifikasi hambatan dalam pelaksanaan PKH di Kelurahan Rejosari Kota Semarang.

## **1.8. Metode Penelitian**

### **1.8.1 Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Sugiyono (2020: 3) metode kualitatif adalah penelitian dengan cara menganalisis dan menginterpretasikan teks dan hasil wawancara yang bertujuan untuk menemukan makna dari fenomena yang terjadi. Metode kualitatif deskriptif merupakan metode yang menggambarkan, meringkas, dan menganalisis data yang didapatkan melalui wawancara dan pengamatan terkait masalah penelitian yang ada di lapangan. Peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif karena penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan Program Keluarga Harapan dan mengidentifikasi apa saja yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kelurahan Rejosari.

### **1.8.2 Situs Penelitian**

Situs penelitian adalah suatu tempat di mana peneliti menangkap keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti untuk memperoleh data atau informasi yang diperlukan. Situs penelitian yang dipilih oleh peneliti, yaitu Kelurahan Rejosari. Penelitian ini dilakukan untuk meninjau kembali keberhasilan dan ketepatan tujuan Program Keluarga Harapan pada masyarakat miskin. Kelurahan Rejosari dipilih karena menurut data dari SP2D PKH Kecamatan Semarang Timur, merupakan kelurahan dengan penerima manfaat bantuan PKH terbanyak di antara kelurahan-kelurahan yang lainnya. Kemudian, Kelurahan Rejosari merupakan wilayah yang dijadikan prioritas penanggulangan kemiskinan oleh Pemerintah Kota Semarang. Selain itu, alasan memilih Kelurahan Rejosari karena belum ada penelitian sebelumnya yang meneliti tentang PKH di kelurahan tersebut.

### **1.8.3 Subjek Penelitian**

Subjek penelitian adalah individu yang dapat memberikan sebuah informasi yang ingin diketahui oleh peneliti yang dalam hal ini disebut informan. Teknik yang digunakan oleh peneliti dalam menentukan informan adalah teknik *purposive sampling* karena peneliti dalam memilih informan sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan sehingga memudahkan peneliti dalam menjelajahi obyek atau situasi sosial dan peneliti mendapatkan data yang tepat. Oleh karena itu, subjek dalam penelitian ini adalah Koordinator PKH Kota Semarang, Koordinator PKH Kecamatan Semarang Timur, Pendamping PKH Kelurahan, dan 5 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH.

#### **1.8.4 Jenis Data**

Jenis data penelitian digolongkan menjadi dua jenis, yaitu kuantitatif (numerik) dan kualitatif (deskriptif). Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif. Menurut Steven dan Jennifer (2002) (dalam Sugiyono, 2020: 3) data kualitatif bukan berkenaan dengan angka, melainkan naratif yang diperoleh dari hasil pengumpulan dan analisis data. Peneliti menggunakan data kualitatif karena peneliti ingin mengevaluasi pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Semarang Timur serta mengidentifikasi hambatan dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kelurahan Rejosari Kota Semarang.

#### **1.8.5 Sumber Data**

Sumber data terdiri dari dua, yaitu data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini digunakan sumber data keduanya.

##### **1. Data Primer**

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian. Dalam penelitian ini peneliti memperoleh data primer dengan melakukan wawancara kepada informan yang termasuk dalam KPM PKH Kelurahan Rejosari sehingga peneliti dapat memperoleh informasi dari jawaban yang diberikan oleh informan.

##### **2. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui perantara. Data sekunder yang dipakai dalam penelitian ini, yaitu buku

cetak, jurnal penelitian terdahulu, *e-book*, *website* internet, dan arsip isntansi yang berkaitan dengan objek penelitian.

### **1.8.6 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data dalam rangka memecahkan masalah penelitian sehingga teknik yang dipilih oleh peneliti harus sistematis, terarah, dan disesuaikan dengan masalah penelitian. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dipilih, yaitu:

#### **1.8.6.1 Wawancara**

Wawancara merupakan suatu metode yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dengan cara melakukan pertemuan antar dua orang yang tujuannya untuk bertukar informasi melalui sesi tanya jawab. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu wawancara tidak berstruktur atau *open question*. Namun, peneliti tetap menggunakan pedoman wawancara sehingga peneliti memperoleh jawaban yang luas dan mendalam yang diberikan oleh informan.

#### **1.8.6.2 Studi Kepustakaan**

Studi kepustakaan adalah suatu metode yang digunakan dalam mengumpulkan semua informasi dengan mempelajari sumber-sumber yang ada. Penelitian ini mengumpulkan informasi dengan menggunakan studi kepustakaan yang berdasar pada buku cetak atau sumber-sumber tertulis baik yang tercetak maupun elektronik lain, dan jurnal penelitian yang berkaitan dengan penelitian.

### **1.8.7 Analisis dan Interpretasi Data**

Analisis dan interpretasi data adalah suatu tahapan menguraikan data dan informasi yang sudah didapatkan dengan menggunakan teori yang telah dijadikan sebuah acuan. Menurut Sugiyono (2020: 133) terdapat tiga tahapan untuk menganalisis data, yaitu:

#### **1. Reduksi Data**

Reduksi data merupakan suatu tahapan merangkum data yang telah diperoleh yang berdasar pada fenomena yang terjadi di lapangan setelah itu data tersebut dirincikan. Data yang dirangkum tersebut hanya poin-poin penting saja sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti dalam melakukan pengumpulan data selanjutnya.

#### **2. Penyajian Data**

Penyajian data merupakan suatu tahapan mengumpulkan seluruh informasi dan mendeskripsikan secara detail sehingga mempermudah peneliti untuk memberikan suatu simpulan dan memutuskan suatu tindakan yang akan dilakukan oleh peneliti.

#### **3. Menarik Kesimpulan**

Dalam tahapan ini penelitian harus berlangsung dari awal hingga akhir penelitian. Tahapan ini bertujuan untuk menelaah pola, tema, dan ikatan antar variabel sehingga menghasilkan kesimpulan yang relevan. Namun, di dalam penelitian suatu kesimpulan yang dihasilkan besar kemungkinannya terjadi perubahan hal ini karena pada umumnya kesimpulan memiliki sifat tentatif.

### 1.8.8 Kualitas Data

Dalam penelitian kualitas data ditunjukkan dengan seberapa besar data yang diperoleh menunjukkan nilai kebenaran. Kebenaran data tersebut yang nantinya akan mewakili data yang sesungguhnya dengan data yang diteliti oleh peneliti secara benar apa adanya. Menurut Holloway dan Daymon (2008: 144) sebuah ciri penelitian yang baik di dalamnya terkandung sebuah otentisitas (*authenticity*) dan kepercayaan (*trustworthinesst*). Keduanya digambarkan pada saat penelitian berlangsung dengan mendokumentasikan seluruh tahapan penelitian dan juga seluruh keputusan yang diambil oleh peneliti.

- a) Otentisitas (*authenticity*), yaitu apabila strategi yang dipakai dalam penelitian tersebut sepadan dengan laporan yang berasal dari gagasan para informan secara sebenar-benarnya (*true reporting*).
- b) Kepercayaan (*trustworthinesst*), yaitu pada saat melakukan sebuah evaluasi kepercayaan terdiri dari beberapa kriteria yang sudah tersusun atas dasar kredibilitas, kemampuan untuk ditransfer (*transferability*), ketergantungan, dan kemampuan untuk dapat dikonfirmasi (*confirmability*).